

DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA

Oleh: Totok Harjanto¹, R. Misriah Ariyani²

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional telah mampu meningkatkan PDB nasional menjadi lebih dari 1 triliun US dollar yang menempatkan Indonesia menjadi negara menengah dengan PDB perkapita diatas US \$ 3500. Pada sisi lain pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan masalah ketimpangan pendapatan. Di ukur dengan indek Gini angka ketimpangan terus meningkat selama proses pembangunan ekonomi. Pada awal pembangunan ekonomi indek Gini ada pada kisaran 0,332 sementara pada tahun 2017 indek Gini meningkat menjadi 0,393. Untuk wilayah pedesaan nilai indek Gini malah meningkat menjadi 0,407 sementara pada awal pembangunan masih pada kisaran 0,309. Secara kewilayahan ada beberapa propinsi dengan indek Gini diatas 0,4 yaitu: propinsi Gorontalo (0,430), propinsi DI Yogyakarta (0,432), propinsi DKI Jakarta (0,413), Sulawesi Selatan (0,407) dan propinsi Jawa Barat (0,403).

Memburuknya angka ketimpangan ini mengindikasikan ada masalah besar selama proses pembangunan ekonomi untuk diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan menyentuh masyarakat miskin untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. Kebijakan ini berupa pemberian insentif dan disinsentif dalam investasi, redistribusi lahan, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa dan pengembangan transportasi berbasis laut.

Kata kunci: Distribusi Pendapatan, Pembangunan, PDB

¹ Dosen Tetap STIE Indonesia, email: harjanto45@gmail.com

² Dosen Tetap UNTAG Cirebon, email: ariyani.misriyah@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 dan sila ke lima dari Pancasila. Tujuan tersebut merupakan bentuk keprihatinan para pendiri negara terhadap kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar penduduk Indonesia selama masa penjajahan. Untuk itu maka sejak proklamasi kemerdekaan maka para pemimpin negara berupaya untuk mewujudkan kekejahtaraan tersebut dengan cara melakukan pembangunan ekonomi secara besar besaran dan berkelanjutan.

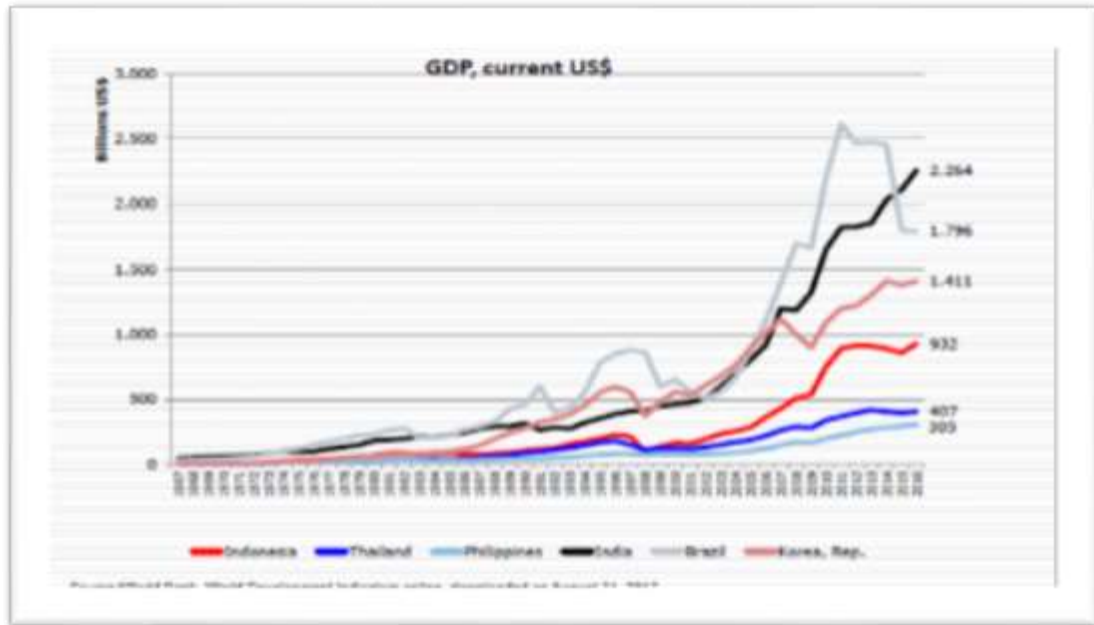
Program pembangunan ekonomi ini secara nyata terjadi sejak masa pemerintahan orde baru yang mewarisi kondisi ekonomi yang terpuruk pada akhir periode pemerintahan orde lama tahun 1967. Dengan ekonomi yang sangat parah inflasi yang sangat tinggi, kemiskinan yang merata, beban hutang luar negeri serta keterbatasan cadangan devisa menjadikan Indonesia negara yang miskin dengan rata rata PDB/ kapita kurang dari US \$ 100 . Dengan kondisi ini pemerintahan orde baru ada awal memegang tampuk pemerintahan diwarisi oleh setumpuk persoalan ekonomi yang parah dan cukup pelik untuk dapat segera diselesaikan diantaranya masalah inflasi, infrastruktur ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan kebutuhan pangan yang bekum tercukupi. Semua persoalan tersebut mendesak untuk segera diselesaikan sehingga menjadi prioritas utama pemerintahan orde baru.

Sejak dilaksanakannya program pembangunan nasional pada tahun 1969, secara bertahap kondisi perekonomian nasional semakin lama semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan peningkatan GDP perkapita masyarakat kurang dari US\$ 100 menjadi sekitar US\$ 3500 pada tahun 2016. Peningkatan GDP perkapita yang sangat signifikan ini tentunya harus disertai dengan tersedianya dana untuk pembangunan ekonomi sehingga proses pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada sisi lainnya laju pertumbuhan ekonomi nasional tercatat rata rata tumbuh diatas 6 % pertahun, laju ini sempat mengalami penurunan pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi negative. Perubahan system politik pada tahun 1999 menyebabkan adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi makro yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi kembali diatas 6 % pertahun. Prestasi ekonomi tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara anggota G 20 dan saat ini akan menjadi kelompok negara Industri baru bersama Brasil, India, China dan Rusia. PDB Indonesia pada tahun 2016 sudah mencapai sekitar US \$ 932 milyar yang merupakan urutan ke 16 dunia (lihat Gambar 1).

Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan nasional ini ternyata diikuti dengan meningkatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Menurut Emil Salim (2009) secara umum adalah menarik bahwa kelompok penduduk yang merupakan 40% dari penduduk pada tahun 1969/1970 memperoleh pendapatan 21,3% dengan indek Gini 0,309 di daerah pedesaan dibandingkan dengan 20.1% dan indek Gini 0,328 pada tahun 1964/1965. Untuk daerah perkotaan di pulau Jawa 40% jumlah penduduk memperoleh 20% pendapatan dengan indek Gini 0,332 pada tahun 1969/70. Kondisi pada tahun 2016 indek Gini rasio meningkat menjadi 0,394 untuk

wilayah kota dan desa. Di daerah perkotaan Gini rasio meningkat menjadi sebesar 0,316 dan didaerah pedesaan Gini rasio sebesar 0,409. Ada kecenderungan terjadi ketimpangan selama pembangunan ekonomi khususnya di daerah pedesaan.

Gambar 1. Perbandingan PDB Indonesia Dengan Negara Lain



Sumber : Faisal Basri 2017

Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan tingkat pendapatan perkapita sebagai indikator kesejahteraan rakyat banyak menimbulkan pertentangan diantara berbagai ahli ekonomi. Pendekatan GNP perkapita kurang memperhatikan tingkat kesejahteraan sosial. Untuk itu beberapa ahli ekonomi berupaya untuk menyempurnakan ukurannya dengan memperhatikan tingkat pembagiannya. Laju pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan laju pertumbuhan pendapatan kelompok-kelompok masyarakat.

Dengan 20% jumlah penduduk memperoleh 50% pendapatan nasional, sedangkan 40% dari jumlah penduduk memperoleh 15% dari pendapatan nasional maka jelaslah bahwa angka pertumbuhan ekonomi makro dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan golongan 20%. Dikarenakan pembagian pendapatan dari golongan 40% rendah maka bobot mereka dalam pertumbuhan ekonomi adalah kecil, walaupun dalam jumlah penduduk mereka lebih besar. (Emil Salim 2010) Untuk itu diperlukan koreksi dengan memberi bobot yang lebih besar pada golongan berpendapatan rendah dibandingkan dengan golongan berpendapatan tinggi. Bobot yang dipakai untuk mengoreksi ini disebut bobot kemiskinan.

Untuk memahami tingkat kepincangan dalam pembagian pendapatan dalam suatu negara adalah perlu untuk membagi penduduk dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk.
2. Kelompok penduduk dengan pendapatan menengah yang merupakan 40 % dari jumlah penduduk
3. Kelompok penduduk berpendapatan rendah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk.

II. KAJIAN TEORI

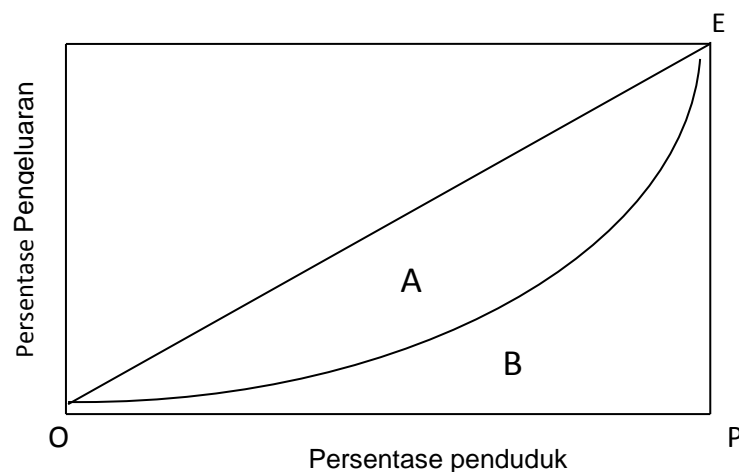
2.1. Ukuran Ketimpangan

Salah satu bentuk dari kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan, untuk menganalisisnya digunakan beberapa ukuran yaitu;

1. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut Kurva Lorenz, seperti yang diperlihatkan kurva di bawah ini. Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE merupakan garis pemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dan luas segitiga OPE ($A+B$). Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakterataannya, dan sebaliknya. Pada kasus ekstrim, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gini adalah satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gini mendekati satu.

Gambar 2 . Kurva Lorenz



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
Dibawah 0,4	<0,4 Tingkat ketimpangan rendah
Antara 0,4 sampai dengan 0.5	0,4 < 0,5 Tingkat ketimpangan sedang
Lebih dari 0,5	> 0,5 Tingkat ketimpangan tinggi

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang banyak dipergunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

2. Ukuran Bank Dunia

Sedangkan Bank dunia mengelompokkan penduduk menurut pendapatannya menjadi 3 kelompok, yaitu;

40% penduduk dengan pendapatan rendah

40% penduduk dengan pendapatan menengah

20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Untuk menentukan tingkat ketimpangannya dapat digunakan patokan yang sudah ditetapkan oleh bank dunia yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Kriteria Bank Dunia Mengukur Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
Kelompok 40% termiskin dengan pengeluaran < 12% dari keseluruhan pengeluaran	Tinggi
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran	Sedang
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran	Rendah

Sumber : Eko Yuli (2009).

Kesulitan dalam memperoleh data pendapatan maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari Susenas.

Distribusi pendapatan dapat di bagi menjadi;

1. Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*). Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga yang mencari penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber

lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumberpendapatanpun turut diabaikan

2. Distribusi pendapatan fungsional Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yangditerima oleh tiap faktor produksi. Faktor produksi tersebut terdiri dari tanah atausumberdaya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai denganfungsinya seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa dan pemilikmodal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang.

Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akanberkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam: a) Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktifitas. b) Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan. Sayangnya relevansi teori fungsional tidak mempengaruhi pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar pasar (faktor-faktor non-ekonomis) misalnya kekuatan dalam menentukan faktor-faktor harga (Todaro, 2003)

Simon Kuznets (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi,distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusipendapatannya akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets U-terbalik, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. Koefisien Gini tampak seperti kurva berbentuk U-Terbalik seiring dengan naiknya PDB.

Menurut Todaro (2003), pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan antar daerah,tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan daerah tersebut. Ketimpangan pendapatan ini tergantung dari besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan. Dengan demikian ketimpangan pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah berdasarkan Produk nasional bruto per kapita , dimana pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat pada nilai PDRB-nya, sedangkan untuk golongan masyarakat tentunya adalah jumlah yang diterimanya pula.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan sebenarnya terjadi diseluruh negara di dunia, baik negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang

berkembang. Perbedaannya adalah ketimpangan distribusi pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembagunan ekonominya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata. Keadaan ini dijelaskan oleh Todaro (1981) bahwa negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang tergolong sedang berkembang.

Nicholas Kaldor (1960), menyatakan bahwa semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan aggregate saving rate yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan PDB merupakan satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi terbaik adalah membuat pola distribusi pendapatan setimpang mungkin.

Model Kuznets dan Kaldor menunjukkan adanya trade off atau pilihan antara pertumbuhan PDRB yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dua model ketimpangan yaitu teori Harrod-Domar dan Neo-Klasik memberikan perhatian khusus pada peranan kapital yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik kapital kedalam daerahnya, hal ini jelas akan berpengaruh pada kemampuan daerah untuk tumbuh sekaligus menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih menguntungkan bila dialokasikan pada daerah-daerah yang dinilai mampu menghasilkan pengembalian (return) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah dalam negara.

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga diterangkan oleh Myrdal (1957) dengan teori keterbalakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada tingkat nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, Myrdal memakai ide spread effect dan backwash effect sebagai bentuk pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect (dampak sebar) didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Backwash effect didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan mencakup aliran manusia dan modal dari wilayah sekitar atau pinggiran ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Terjadinya ketimpangan regional menurut Myrdal disebabkan oleh besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional,

permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya, lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil T. Makmur, dkk (2011) dengan menggunakan koefisien Gini (*Gini ratio*) dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Peukan Bada adalah ketimpangan sedang untuk pekerjaan penduduk sebagai petani dan buruh dan ketimpangan rendah untuk pekerjaan penduduk sebagai pedagang dan PNS. Secara keseluruhan sampel diperoleh indeks gini sebesar 0,386, ini artinya pada kabupaten Peukan Bada mempunyai nilai ketimpangan distribusi pendapatannya sedang.

Linggar Dewangga Putra (2011) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda membuktikan bahwa pendapatan yang diukur dari Indeks Gini dan Indeks Williamson berpengaruh positif pada jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Hasil penelitian Halim, dkk (2010) menunjukkan bahwa sumber pendapatan petani kopi arabika cukup beragam dimana pendapatan dari usaha tani kopi arabika memberikan kontribusi sebesar 65,68% terhadap total pendapatan petani. Tingkat ketimpangan pendapatan petani kopi arabika berdasarkan nilai gini ratio sebesar 0,36 berada dalam kategori menengah.

Sementara Harjanto (2014) kultur budaya konsumtif dan tingginya tingkat korupsi semakin memperparah proses pemiskinan penduduk. Anggaran pembangunan yang seharusnya mampu merubah nasib kelompok ini dijarah para elite, birokrat dan pengusaha. Banyak proyek pembangunan yang realisasinya tidak sesuai dengan anggaran sehingga kualitas proyek menjadi berkurang. *Trickle down effect* ternyata tidak terjadi, sehingga kesenjangan pendapatan menjadi sangat tinggi. Kondisi ini dapat dilihat secara di berbagai wilayah Indonesia, pada satu sisi banyak pejabat birokrasi dan legislative menggunakan fasilitas mewah berupa kendaraan dinas yang mewah, fasilitas kesehatan, tunjangan jabatan dan manfaat lain dari jabatannya. Sementara pada sisi yang lain banyak rakyat yang pendapatannya masih di bawah Rp 20.000 per hari yang tinggal di rumah yang tanpa fasilitas memadai. Hidup tanpa jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya sehingga kalau sakit akan menjadi bertambah miskin.

III. METODA PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersifat penelitian diskriptif komparatif yang melihat kondisi data pada satu periode dengan periode yang lain. Dalam penelitian diskriptif analisa ditujukan untuk mengetahui gambaran secara detail tentang kondisi

riil yang ada , dengan cara membandingkan data secara tahunan maupun secara kewilayahan. Dengan demikian akan didapatkan gambaran riil kondisi kesenjangan pendapatan yang terjadi pada wilayah tersebut.

3.2. Sampel Data

Dalam penelitian ini digunakan data yang telah dipublikasikan oleh BPS. Dengan sampel data adalah data dari publikasi BPS tahun 1999 sampai tahun 2017. Pemilihan sampel dilakukan secara random sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3. Analisa Data

Dalam kajian ini digunakan pendekatan analisis diskriptif komparatif yang tujuannya adalah menjelaskan perubahan data antara satu periode dengan periode yang lain. Perubahan tersebut diperbandingkan dengan standar ukuran yang sudah ditetapkan dan diakui secara internasional. Dengan demikian dapat diketahui dampak perubahannya terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Selain juga dilakukan analisa pada tingkat wilayah propinsi untuk lebih memahami karakter dari masing masing propinsi berdasarkan pembagian wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Dengan adanya komparasi antar propinsi maka dapat diketahui wilayah mana yang kondisi ketimpangan sosialnya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan pada tingkat nasional.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Ketimpangan di Indonesia

Berdasarkan data dari tahun 1996 sampai tahun 2017 kondisi ketimpangan di Indonesia, secara umum dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Rasio Gini Menurut Daerah Tahun 1996-2017

Tahun	Gini Rasio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
1996	0,362	0,274	0,356
1999	0,326	0,244	0,311
2002	0,330	0,290	0,329
2005	0,338	0,264	0,343
2006	0,350	0,276	0,357
2007	0,374	0,302	0,376
2008	0,367	0,300	0,368
2016	0,316	0,409	0,394
2017	0,320	0,407	0,393

Sumber : BPS Beberapa Penerbitan

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa tingkat ketimpangan cenderung meningkat sejak tahun 1999. Indek Gini rasio pada tahun 1999 masih pada tingkat 0,311 terus meningkat menjadi 0,343 pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 0,667

pada tahun 2016 dan menjadi 0,393 pada tahun 2017. Dengan demikian selama proses reformasi justru terjadi ketimpangan yang cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan belum mampu mendorong perubahan struktur pendapatan masyarakat. Pada wilayah pedesaan struktur pendapatan masyarakat di daerah pedesaan cenderung semakin timpang , jika pada tahun 1999 indek Gini Rasio masih pada tingkat 0,274, indek ini cenderung terus meningkat pada tahun 2006 menjadi 0,276 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 0, 410 dan raelatif konstan dengan angka 0,409 pada tahun 2017. Tingginya tingkat kesenjangan pendapatan di daerah pedesaan mengindikasikan terjadinya perubahan kepemilikan aset aset dari masyarakat miskin ke masyarakat kaya. Artinya ada persoalan ekonomi yang menghimpit kelompok masyarakat miskin sehingga melepas aset aset miliknya. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Distribusi Pendapatan Indonesia 1999-2017

Indikator	1999	2002	2003	2005	2017
Komposisi Pendapatan Keluarga					
Pengeluaran Untuk Pangan	62,94	58,47	56,89	51,37	50,62
Pengeluaran Untuk Non Pangan	37,06	41,53	43,11	48,63	49,38
Distribusi Pendapatan					
40% Penduduk terendah	21,66	20,92	20,57	18,81	17,12
40% penduduk menengah	37,77	36,89	37,10	36,40	36,47
20% penduduk kaya	40,57	42,19	42,33	44,78	46,41
Indek Gini	0,31	0,33	0,32	0,36	0,39

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kenaikan indek gini ini dapat ditelusuri dari persentase pendapatan penduduk. Sejak tahun 1999 , persentase pendapatan terendah terus menurun dari 21,66 persen menjadi 18,81 persen pada tahun 2005. Sementara pada tahun 2016 nilainya terus menurun menjadi 17,02 persen dan pada tahun 2017 menjadi 17,12 persen. Pada sisi lain persentase pendapatan penduduk kaya cenderung terus meningkat dari 40,57 persen pada tahun 1999 meningkat menjadi 44,78 persen pada tahun 2005 dan naik menjadi 46,41 persen pada tahun 2017.

Dengan menggunakan indikator bank dunia maka secara riil telah terjadi penurunan tingkat kesenjangan di masayakat Indonesia dari tahun 1999 sampai tahun 2017 masuk dalam kategori tingkat kesenjangan yang sedang dengan 40 pesen kelompok penduduk miskin hanya mendapatkan pendapatan sebesar 17,02 persen. Sementara kelompok penduduk kaya persentasennya meningkat dari 40% pada tahun 1999 menjadi 46,89 persen pada tahun 2016 dan 46,41 persen pada tahun 2017. Artinya telah terjadi pengalihan kekayaan dari kelompok miskin ke kelompok kaya selama kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2017. Orang miskin cenderung menjadi lebih miskin dan kelompok penduduk kaya cenderung semakin kaya. Berdasarkan data dari tahun 1999 sampai tahun 2017 , distribusi pendapatan

kelompok menengah relatif stabil pada kisaran 36 persen sampai 37 persen . Dengan demikian struktur pendapatan masyarakat kelas menengah relatif stabil.

Jika dilihat dari lokasi tempat ketimpangan tinggi ternyata terjadi di wilayah pedesaan dengan indek gini sebesar 0,407 pada tahun 2017. Sementara di wilayah perkotaan justru lebih rendah yaitu sebesar 0,320 pada tahun yang sama. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat diketahui bahwa pada wilayah perkotaan 40 persen kelompok masyarakat miskin mendapatkan 16,04 persen sementara diwilayah pedesaan mendapatkan 20,36 persen.

Tabel 4.3. Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia Tahun 2016 – 2017

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2016	15,91	36,74	47,35	100
September 2016	16,02	36,67	47,31	100
Maret 2017	16,04	36,89	47,07	100
Perdesaan				
Maret 2016	20,40	38,50	41,10	100
September 2016	20,52	39,82	39,66	100
Maret 2017	20,36	39,65	39,99	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2016	17,02	36,09	46,89	100
September 2016	17,11	36,33	46,56	100
Maret 2017	17,12	36,47	46,41	100

Sumber: BPS 2017

4.2. Tingkat Ketimpangan Di daerah

Jika dilihat pada tingkat propinsi maka kondisi ketimpangan pendapatan untuk 33 propinsi dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Data ketimpangan adalah data dari tahun 2016 sampai tahun 2017, dengan membagi analisa dalam dua bagian yaitu wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan.

Tabel 4.4. Indek Gini Indonesia Tahun 2016 – 2017 menurut Provinsi

Provinsi	Maret 2016			Maret 2017		
	Desa	Kota	Desa + Kota	Desa	Kota	Desa + Kota
Aceh	0,343	0,288	0,333	0,347	0,293	0,329
Sumatera Utara	0,334	0,282	0,319	0,342	0,256	0,315
Sumatera Barat	0,353	0,288	0,331	0,336	0,276	0,318
Riau	0,369	0,309	0,347	0,353	0,289	0,325
Jambi	0,377	0,313	0,349	0,384	0,284	0,335
Sumatera Selatan	0,373	0,293	0,348	0,384	0,317	0,361
Bengkulu	0,385	0,302	0,357	0,390	0,305	0,351
Lampung	0,393	0,330	0,364	0,364	0,297	0,334
Bangka Belitung	0,289	0,240	0,275	0,303	0,219	0,282
Kepulauan Riau	0,351	0,284	0,354	0,327	0,279	0,334
DKI Jakarta	0,411	-	0,411	0,413	-	0,413

Provinsi	Maret 2016			Maret 2017		
	Desa	Kota	Desa + Kota	Desa	Kota	Desa + Kota
Jawa Barat	0,423	0,317	0,413	0,412	0,324	0,403
Jawa Tengah	0,381	0,323	0,366	0,386	0,327	0,365
DI Yogyakarta	0,423	0,334	0,420	0,435	0,340	0,432
Jawa Timur	0,423	0,333	0,402	0,418	0,326	0,396
Banten	0,402	0,264	0,394	0,381	0,267	0,382
Bali	0,369	0,329	0,366	0,382	0,325	0,384
Nusa Tenggara Barat	0,391	0,317	0,359	0,413	0,314	0,371
Nusa Tenggara Timur	0,330	0,281	0,336	0,362	0,311	0,359
Kalimantan Barat	0,373	0,296	0,341	0,356	0,274	0,327
Kalimantan Tengah	0,359	0,296	0,330	0,370	0,310	0,343
Kalimantan Selatan	0,346	0,297	0,332	0,365	0,292	0,347
Kalimantan Timur	0,314	0,288	0,315	0,323	0,298	0,330
Kalimantan Utara	0,304	0,268	0,300	0,298	0,268	0,308
Sulawesi Utara	0,386	0,355	0,386	0,405	0,355	0,396
Sulawesi Tengah	0,387	0,320	0,362	0,379	0,309	0,355
Sulawesi Selatan	0,422	0,367	0,426	0,410	0,348	0,407
Sulawesi Tenggara	0,407	0,367	0,402	0,403	0,358	0,394
Gorontalo	0,414	0,392	0,419	0,417	0,403	0,430
Sulawesi Barat	0,393	0,347	0,364	0,424	0,323	0,354
Maluku	0,327	0,313	0,348	0,333	0,312	0,343
Maluku Utara	0,295	0,249	0,286	0,322	0,265	0,317
Papua Barat	0,326	0,376	0,373	0,349	0,392	0,390
Papua	0,312	0,383	0,390	0,322	0,395	0,397
Indonesia	0,410	0,327	0,397	0,407	0,320	0,393

Sumber : BPS 2017

Distribusi pendapatan untuk setiap provinsi dari tahun 2016 sampai tahun 2017 terlihat bahwa tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Propinsi Gorontalo dengan indek Gini 0,430 , propinsi DIY dengan indek gini sebesar 0,432, propinsi Sulawesi Selatan 407, propinsi DKI Jakarta 0,413 dan propinsi Jawa Jarat 0,403. Tingkat ketimpangan terendah terdapat di propinsi Bangka Belitung dengan indek Gini sebesar 0,282. Sementara proinsi yang mampu menurunkan indek Gini dari 0,4 menjadi kurang dari 0,4 adalah propinsi Jawa Timur dari 0,402 menjadi 3,96. Jika dilihat dari kewilayahan sebagian besar ketimpangan terjadi di Pulau Jawa, artinya tingginya kepadatan penduduk nampaknya menimbulkan ketimpangan dalam pendapatannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Proses pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan secara besar besaran sejak tahun 1969 sampai saat ini ternyata mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Diukur dari GNP perkapita telah terjadi peningkatan pendapatan perkapita dari US\$ 100 pada awal pembangunan ekonomi, menjadi

sebesar US\$ 3000 ternyata menimbulkan dampak berupa tingginya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Jika dilihat dari indeks Gini pada awal pembangunan ekonomi indeks Gini ada pada kisaran 0,332 sementara pada tahun 2017 indeks gini meningkat menjadi 0,393 . Untuk wilayah pedesaan nilai indeks Gini malah meningkat menjadi 0,407 sementara pada awal pembangunan masih pada kisaran 0,309.

Kondisi ini tentunya sangat merisaukan karena proses pembangunan ekonomi justru malah meningkatkan jurang pendapatan antara kelompok masyarakat miskin dengan kelompok masyarakat kaya. Ada kecenderungan penmgalihan aset kekayaan dari kelompok miskin ke kelompok kaya. Jika pada awal pembangunan ekonomi 40 % kelompok masyarakat miskin masih mendapatkan 21% dari pendapatan nasional, maka pada tahun 2016 nilainya menjadi 17,11 %. Sementara 20% kelompok masyarakat kaya menikmati 46,56 % dari pendapatan nasional. Untuk kelompok menengah nilai relatif stabil pada kisaran 0.36 sampai 0,38 persen.

5.2. Saran

1. Pembangunan seharusnya tidak hanya bertumpu pada upaya mengejar laju pertumbuhan ekonomi, diperlukan perubahan konsep pembangunan dari pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi. Kebijakan yang bisa dilakukan adalah redistribusi kepemilikan lahan.
2. Dengan posisi geografis yang berupa kepulauan perlu di kembangkan pusat pusat pertumbuhan pada pulau pulau besar sehingga tidak terjadi penumpukan penduduk di pulau Jawa. Ada kebijakan insentif dan disinsentif agar investasi skala besar dapat berada diluar pulau Jawa, khususnya Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
3. Pengembangan transportasi berbasis laut sehingga akan mendorong perkembangan pulau di luar Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*, Pustaka Pelajar, 2009.
- BPS, *Statistik Indonesia Tahun 2017*.
- Didin S Damanhuri, *Ekonomi Politik dan Pembangunan, Teori, Kritik dan Solusi Bagi Indonesia dan negara Berkembang*, PT Penerbit IPB Press, Bogor , 2010
- Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Dalam Khasanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Totok Harjanto, *Pengangguran dan Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi UNTAG Cirebon volume 1 Januari - April 2014 .
- Totok Harjanto, *Masalah Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi UNTAG Cirebon volume 2 Mei - Agustus 2014.